

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara *megabiodiversity* di dunia, yang berarti negara ini memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, baik dalam hal jumlah spesies dan jenisnya. Keanekaragaman hayati di Indonesia mencakup berbagai spesies tumbuhan, hewan, dan ekosistem yang unik.

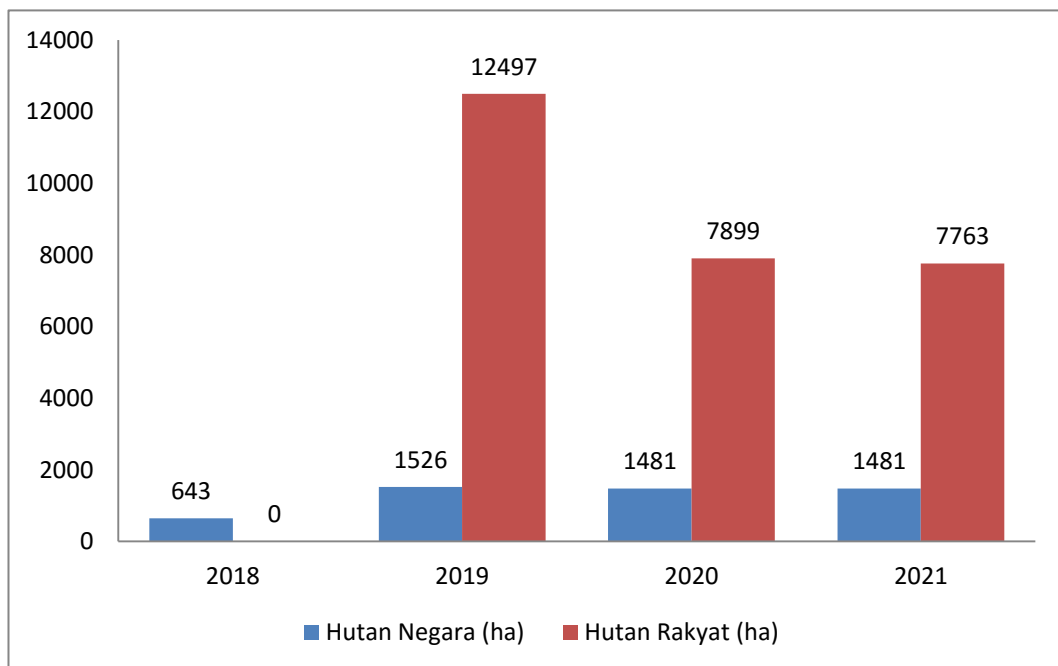
Keanekaragaman hayati yang tinggi di Indonesia adalah aset alam yang sangat berharga dan penting untuk pelestarian lingkungan global, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia. Pelestarian dan pengelolaan yang berkelanjutan sangat penting untuk melindungi kekayaan ini bagi generasi mendatang.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya pada saat me-launching Penyelesaian Tata Batas Menuju Penetapan Kawasan Hutan 100% Tahun 2023, di Jakarta (30/1/2023), Indonesia merupakan salah satu negara yang hampir di seluruh provinsinya memiliki wilayah hutan. Luas wilayah hutan yang dimiliki oleh Indonesia per tahun 2023 kurang lebih sekitar seluas 125.795.306 Ha.

Luas penggunaan lahan dan luas kawasan hutan di Provinsi Jawa Tengah adalah aspek penting dalam manajemen lingkungan dan pelestarian sumber daya alam di wilayah ini. Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah sekitar 1448.815,61 kilometer persegi, dan penggunaan lahan yang bervariasi di seluruh

kabupaten dan kota di dalamnya (BPS Jawa Tengah, 2021) . Hutan di Provinsi Jawa Tengah merupakan aset berharga dalam pelestarian lingkungan alam.

Gambar 1.1
Luas Penggunaan Lahan dan Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Klaten



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data luas penggunaan lahan dan luas kawasan Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2018 Kabupaten Klaten memiliki hutan negara dengan luas 643 Ha. Keluasan hutan negara di Kabupaten Klaten semakin meningkat hingga pada tahun 2021 mencapai 1481 ha. Kabupaten Klaten memiliki hutan rakyat dimana keluasan hutan tersebut lebih banyak dari hutan yang dimiliki oleh negara, pada tahun 2018 Kabupaten Klaten tidak memiliki hutan rakyat namun seiring berjalannya waktu dengan adanya pengukuran batas antara hutan negara dan hutan rakyat maka hutan tersebut terdata pada tahun 2019 memiliki luas 12497 ha semakin menurun hingga pada tahun 2021 hanya mencapai 7763 ha. Hutan di

Indonesia saat ini menghadapi berbagai ancaman seperti deforestasi, kebakaran hutan, dan konversi lahan untuk pertanian dan industri. Upaya konservasi hutan menjadi sangat penting untuk melindungi kekayaan hayati dan ekologi yang ada di Indonesia. Beberapa upaya perlindungan termasuk pembentukan taman nasional, hutan lindung, dan upaya pengelolaan hutan berkelanjutan.

Keberadaan hutan sangat berpotensi bagi kelangsungan hidup, maka dari itu, pelestarian dan perlindungan terhadap hutan harus dijadikan sebagai salah satu fokus utama pemerintah dalam rencana pembangunannya. Data ini dirilis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PKTL KLHK) menunjukkan laju deforestasi di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu sekitar 115,46 ribu hektare per tahun 2020. Data tambahan dari organisasi *Global Forest Watch* menampilkan grafis selama tahun 2001-2021 Indonesia kehilangan wilayah hutan tutupan pohon sekitar 96% yang disebabkan oleh deforestasi.

Tingginya laju deforestasi tersebut tentu dapat mengancam keberadaan dan kelestarian hutan. Salah satu penyumbang terbesar dari tingginya laju deforestasi tersebut adalah adanya kebakaran hutan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar maupun perusahaan besar swasta secara ilegal dengan tujuan untuk membuka lahan.

Kebakaran hutan merupakan kejadian dimana api melalap bahan bervegetasi yang terjadi didalam kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali, sedangkan kebakaran lahan terjadi di kawasan non hutan. Api merupakan fenomena alam yang dihasilkan dari kombinasi yang cepat antara

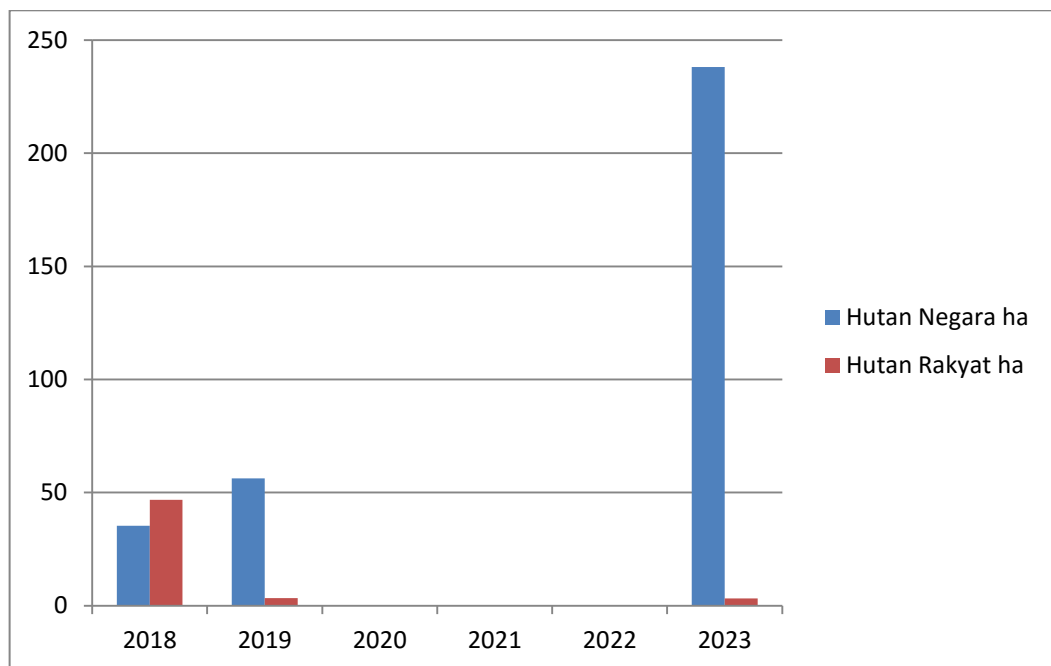
oksigen dengan suatu bahan bakar yang terjelma dalam bentuk panas, cahaya dan nyala. Terdapat tiga komponen yang diperlukan untuk setiap api agar dapat menyala dan mengalami proses pembakaran yaitu pertama harus tersedia bahan bakar yang dapat terbakar; kedua panas yang cukup digunakan untuk menaikkan suhu bahan bakar hingga ke titik penyalan; ketiga udara diperlukan untuk mensuplai oksigen agar proses pembakaran tetap berjalan dan untuk mempertahankan suplai panas sehingga memungkinkan penyalan bahan bakar yang sulit terbakar (Syaufina 2008).

Secara regulasi larangan pembakaran hutan dan lahan telah diatur, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin berkembangnya masyarakat maka tidak dipungkiri penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 harus dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu pengaturan tentang pelarangan pembakaran hutan dan lahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan perusakan hutan, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menurut Saharjo (1999) dalam buku Adinugroho (2005) menyatakan bahwa baik di areal HTI, hutan alam dan perladangan berpindah dapat dikatakan bahwa 99% penyebab kebakaran hutan di Indonesia adalah berasal dari ulah manusia, entah itu sengaja dibakar atau karena api lompat yang terjadi akibat kelalaian pada saat penyiapan lahan. Sedangkan sisanya (0,1%) adalah karena alam. Bahan bakar

dan api merupakan faktor penting untuk mempersiapkan lahan pertanian dan perkebunan (Saharjo, 1999). Pembakaran selain dianggap mudah dan murah juga menghasilkan bahan mineral yang siap diserap oleh tumbuhan. Banyaknya jumlah bahan bakar yang dibakar di atas lahan akhirnya akan menyebabkan asap tebal dan kerusakan lingkungan yang luas. Untuk itu, agar dampak lingkungan yang ditimbulkannya kecil, maka penggunaan api dan bahan bakar pada penyiapan lahan haruslah diatur secara cermat dan hati-hati.

Gambar 1.2
Kejadian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kecamatan Bayat



Sumber : Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah X

Menurut grafik 2 kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat dengan luas 82,15 ha terdiri dari hutan negara seluas 35,4 ha dan hutan rakyat seluas 46,75 ha. Pada tahun 2019 terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat dengan luas 59,65 ha terdiri dari hutan negara seluas

56,25 ha dan hutan rakyat seluas 3,4 ha. Kecamatan Bayat tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan tahun 2020 hingga 2022. Kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat kembali terjadi di tahun 2023 dengan jumlah yang lebih luas daripada tahun sebelumnya dimana seluas 241,3 ha lahan hutan terbakar yang terdiri dari hutan negara seluas 238 ha dan hutan rakyat seluas 3,3 ha.

Gambar 1.3 **Berita Pelaku Pembakaran Hutan**



Sumber : Website Suara Merdeka

https://solo.suaramerdeka.com/solo-raya/0510588417/dikejar-petugas-dua-remaja-pemantik-kebakaran-hutan-perhutani-di-klaten-tertangkap?page=2#google_vignette

Sebagaimana yang terjadi di Hutan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Kawasan hutan yang berada di kompleks Hutan Bayat, bagian Hutan Surakarta, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Surakarta terdapat kawasan hutan. Rata-rata tegakan di hutan wilayah Kecamatan Bayat adalah tanaman jati. Jika musim kemarau daun jati rawan terbakar. Faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Bayat adalah dari warga sendiri yang sering membakar sampah dan daun jati kering di Kawasan Hutan Bayat. Musim daun jati berguguran menjadi salah satu penanda rawan kebakaran. Secara definisi, para ahli mendefinisikan *collaborative governance* dalam beberapa makna yang ide

utamanya sama, yakni adanya kolaborasi antara sektor publik dan non publik atau privat dalam penyelenggaraan pemerintahan atau *governance*. Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai berikut ini:

“*Collaborative governance* adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung stakeholder non-state di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi consensus dan deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program atau aset.”

Pemerintahan kolaboratif dilatarbelakangi karena adanya keterbatasan kemampuan baik sumber daya manusia maupun jaringan yang dimiliki suatu instansi dalam menangani masalah-masalah yang terjadi.

Kolaborasi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 350/248 tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Klaten. Surat Keputusan Bersama tersebut dibuat atas pertimbangan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi sehingga dapat secara optimal menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Kabupaten Klaten. Atas dasar surat keputusan bersama tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten membentuk kolaborasi untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karena tingkat masalah yang berhubungan dengan kebakaran hutan tergolong tinggi dan meningkat setiap tahunnya. Sehingga, untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat diketahui di dalam Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 350/248 tahun

2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Klaten, Penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan oleh:

- a. Pemerintah
- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- c. Organisasi Kemasyarakatan
- d. Komunitas Relawan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2018 pasal 9 ayat 2, Cabang Dinas Kehutanan Jawa Tengah memiliki peran menyiapkan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan menyiapkan pelaksanaan penyuluhan kehutanan dalam hal ini Cabang Dinas Kehutanan Jawa Tengah Wilayah X melakukan sosialisasi dan penyuluhan sadar masyarakat akan dampak kebakaran hutan dan lahan serta patroli hutan dalam rangka pencegahan kebakaran hutan.

Gambar 1.4 Kegiatan patroli oleh Penyuluh CDK X Jawa Tengah



Sumber : Instagram @pusluhlkhk

Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.3/PPt/SET/KUM.1/1/2018 pasal 3 ayat 2 yaitu Pembentukan /Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA), dalam hal ini MPA Bayat berperan untuk mencegah terjadinya karhutla; Melakukan pemadaman awal dan mendukung pemadaman yang dilakukan oleh manggala agni dan/ atau para pihak; Meningkatkan kepedulian masyarakat di desanya terkait dalkarhutla dan/ atau upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; Melakukan identifikasi upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; Mengusulkan calon lokasi ProKlim; Memberikan informasi terkait kejadian karhutla; Menyebarkan informasi peringkat bahaya kebakaran hutan dan lahan; Melakukan penyuluhan secara mandiri atau bersamasama dengan para pihak lainnya; Melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka penguatan kelembagaan.

Gambar 1.5 **Upaya Pencegahan Karhutla Oleh MPA**



Sumber : Website Sawit Indonesia

<https://sawitindonesia.com/mpa-bayat-lindungi-hutan-di-selatan-klaten-dari-kebakaran/>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara pasal 3 ayat 1 yaitu

Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian dalam pasal 3 ayat 5 yaitu Pengelolaan Hutan di Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dikerjasamakan dengan pihak lain. Dalam hal ini Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta melalui Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Cawas yang memiliki hak atas kepemilikan dan pengelolaan atas hutan negara di Kecamatan Bayat bekerja sama dengan beberapa stakeholder dalam pengelolaan hutan.

Gambar 1.6 **Kerja sama Perhutani Dengan Beberapa Stakeholder Dalam Pengelolaan Hutan**



Sumber : Website Perhutani

<https://www.perhutani.co.id/perhutani-bersama-bpbd-dan-cdk-x-antisipasi-karhutla-di-bayat-klaten/>

Kolaborasi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilatarbelakangi oleh Perhutani RPH (Resor Pengelolaan Hutan) Cawas selaku pemangku

wilayah hutan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten memiliki keterbatasan sumber daya manusia dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di hutan Bayat dan kesulitan menjangkau medan saat terjadi kebakaran hutan. Dalam hal ini, Cabang Dinas Kehutanan Jawa Tengah Wilayah X membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) Bayat yang anggotanya terdiri dari warga sekitar Kecamatan Bayat sekaligus penyuluh pendamping untuk membantu RPH Cawas dalam menangani kebakaran hutan dan mengelola hutan Bayat. Kegiatan kolaboratif ini tidak hanya dilakukan saat kebakaran terjadi namun saat pra kebakaran dan pasca kebakaran. Kegiatan pra kebakaran yaitu kegiatan pertemuan rutin antara penyuluh pendamping, RPH Cawas, dan MPA Bayat, patroli hutan, pembuatan sekat bakar, dan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan pasca kebakaran yaitu penanaman kembali kawasan yang terdampak kebakaran.

Dengan adanya bentuk kolaborasi antara pemerintah, BUMN dan masyarakat seharusnya dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan efektif dan efisien, namun berdasarkan data yang ada kebakaran terus menerus terjadi setiap tahunnya.

Penelitian yang ditulis oleh Dody Ruswandi dengan judul *Collaborative Governance On Natural Disaster Management : A Study On Forest And Land Fires In Central Kalimantan*. Penelitian ini bertujuan Untuk mengkaji proses kolaborasi kolaboratif antar pemangku kepentingan yang belum berjalan optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tata kelola kolaboratif untuk pengelolaan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dengan pendekatan teori *Collaborative Governance* Ansell & Gash

melalui 4 (empat) variabel belum berjalan efektif. Peran dan fungsi pemangku kepentingan belum dimasukkan ke dalam prinsip-prinsip model kolaboratif. Penelitian pada empat (empat) variabel kolaboratif menunjukkan bahwa kondisi daripada penelitian tidak menunjukkan bahwa proses kolaboratif berjalan dengan baik. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu lokus penelitian yang berbeda.

Penelitian yang ditulis oleh Hashfi Rafdi, Sadu Wasistiono dan Meltarini dengan judul penelitian *Collaborative Governance* Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses tatakelola kolaboratif yang terjadi dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut serta menganalisis strategi berfikir menggunakan konsep pengukuran strategi baru yaitu analisis SWAR sekaligus mengujinya pada studi empirik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses kolaborasi sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dilihat dari keterlibatan swasta dalam mengupayakan tindakan pencegahan dan kesadaran dari masyarakat cukup tinggi akan bahaya dan sanksi yang akan diterima bila terbukti melakukan tindakan kriminal terhadap hutan dan lahan, Selain itu faktor cuaca sangat mempengaruhi terjadinya bencana karhutla, hal ini ditunjukkan melalui pendekatan teori *Collaborative Governance* Ansell and Gash (2007) dimana penanggulangan karhutla dapat dilihat dari kondisi awal, Desain Kelembagaan dan kepemimpinan fasilitatif yang mempengaruhi proses kolaborasi. Dari hasil analisis SWAR ditemukan beberapa kelemahan, kekuatan serta kewenangan yang menjadi pemerintah daerah terhadap penanggulangan bencana karhutla dengan hasil yang

masih perlu banyak di evaluasi dari pemerintah itu sendiri sebelum melakukan kolaborasi. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu menganalisis strategi berfikir menggunakan konsep pengukuran strategi baru yaitu analisis SWAR sedangkan penelitian ini tidak, kemudian lokusnya juga berbeda.

Penelitian yang ditulis oleh Niluh Eka Puri Setiawandari dan Arimurti Kriswibowo dengan judul *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah. Berdasarkan temuan penelitian, proses kerjasama di TPST Sampah Tanggung Jawabku di Kabupaten Lamongan berjalan dengan baik meskipun masih terdapat hambatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola kolaboratif telah berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari aspek kolaborasi Ansell and Gash. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu lokus penelitian yang berbeda, kemudian penelitian terdahulu membahas mengenai pengelolaan sampah sedangkan penelitian ini membahas pengendalian kebakaran hutan.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu maka, peneliti tertarik untuk mengetahui proses kolabratif antara pemerintah, BUMN, dan MPA dalam mengatasi kebakaran lahan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Karena akibat kebakaran hutan pemerintah mengalami kerugian yang sangat tinggi dan masyarakat banyak yang terganggu kesehatannya. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: ” **Proses Collaborative Governance Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten**”.

1.2 Rumusan Masalah Dan Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya :

1. Meningkatnya angka kebakaran hutan dan lahan dari tahun 2018 hingga 2023.
2. Kebakaran hutan dan lahan yang meningkat disebabkan karena pemahaman masyarakat yang kurang terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan.
3. Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 350/248 tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Klaten dimana didalam peraturan tersebut hanya tercantum banyak instansi dari pemerintah namun dalam kolaborasi tidak semua aktor dalam SK terlibat penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang dapat dijelaskan fokus masalah penelitian, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat proses *Collaborative Governance* dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang akan diteliti, terdapat dasar dari penelitian yang dijelaskan dalam tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan

hal yang akan dicapai dari sebuah penelitian sejak dimulainya proses penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis proses *Collaborative Governance* dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat proses *Collaborative Governance* dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai Proses *Collaborative Governance* dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana dalam melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis, dan kemampuan penulisan karya ilmiah dengan berpedoman pada kajian teori yang didapatkan dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik terutama yang berkaitan dengan proses *Collaborative Governance* dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan, serta bermanfaat untuk dapat mengetahui proses *Collaborative Governance* dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten bagi peneliti secara khusus dan pembaca secara umum.

1.4.3 Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam proses *Collaborative Governance* dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan pengetahuan tentang proses *Collaborative Governance* dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten yang pada hakekatnya bermanfaat dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan atau Perbedaan
1.	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Aceh	Bela Safira, Alfi Rahman, Wais Alqarni Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 8, Nomor 1	Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh yang dilihat melalui pendekatan collaborative governance.	Kolaborasi yang dilakukan pada indikator <i>initial condition</i> sudah terlihat. Pada indikator <i>contingencies and constraints, outcomes and accountabilitys, structure and process components</i> masih mengalami kendala di beberapa elemen pendukung pada indikator.	Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu teori yang digunakan dan lokus yang berbeda

No	Judul Penelitian	Peneliti dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan atau Perbedaan
2.	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau	Hashfi Rafdi, Sadu Wasistion, Meltarini Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 5 Nomor 1	Penelitian ini bertujuan menganalisis proses tata kelola kolaboratif yang terjadi serta menganalisis strategi berfikir menggunakan pengukuran strategi baru yaitu analisis SWAR sekaligus mengujinya pada studi empirik.	Proses kolaborasi sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini ditunjukkan melalui pendekatan teori <i>Collaborative Governance</i> Ansell and Gash (2007) dimana penanggulangan karhutla dapat dilihat dari kondisi awal, Desain Kelembagaan dan kepemimpinan fasilitatif yang mempengaruhi proses kolaborasi. Dari hasil analisis SWAR ditemukan	Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu menganalisis menggunakan konsep pengukuran strategi baru yaitu analisis SWAR sedangkan penelitian ini tidak menggunakan analisis tersebut

No	Judul Penelitian	Peneliti dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan atau Perbedaan
				beberapa kelemahan, kekuatan serta hasil yang masih perlu banyak di evaluasi sebelum melakukan kolaborasi.	
3.	<i>Collaborative governance</i> penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Tahun 2020	Marta Delima Lumbanbantu, Fitri Kurnianingsih, Okparizan Student online journal	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses tata kelola kolaboratif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di kecamatan Toapaya.	Implementasi <i>collaborative governance</i> dalam penanggulangan kebakaran hutan di Kecamatan Toapaya belum berjalan optimal dilihat dari indikatornya	Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu teori yang digunakan berbeda dan lokusnya juga berbeda

No	Judul Penelitian	Peneliti dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan atau Perbedaan
4.	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut	Tri Maylani dan Dadang Manshur Jurnal Kebijakan Publik Volume 10 Nomor 2	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui <i>collaborative governance</i> dalam pencegahan kebakaran hutan dan gambut di Kabupaten Bengkalis	<i>Collaborative governance</i> dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis belum maksimal.	Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu lokus penelitian yang berbeda
5.	Kolaborasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Barito	Muhammad Faudy Pratama	Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Kolaborasi BPBD, Hambatan Dan Upaya Dalam Mencegah Kebakaran Hutan Dan	Proses pelaksanaan kolaborasi terdapat banyak kendala mulai dari sarana prasarana yang dimiliki oleh badan penanggulangan bencana daerah dan	Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu teori yang digunakan berbeda dan lokusnya juga berbeda

No	Judul Penelitian	Peneliti dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan atau Perbedaan
	Timur Provinsi Kalimantan Tengah		Lahan Di Kabupaten Barito Timur	jumlah personil lapangan yang sangat sedikit sehingga membuat kolaborasi dengan instansi lain sangat dibutuhkan.	
6.	<i>Collaborative Governance On Natural Disaster Management : A Study On Forest Fires In Central Kalimantan</i>	Dody Ruswandi Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan	Untuk mengkaji proses kolaborasi kolaboratif antar pemangku kepentingan yang belum berjalan optimal	Tata kelola kolaboratif untuk pengelolaan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pulang Pisau dengan pendekatan teori <i>Collaborative Governance</i> Ansell & Gash melalui 4 (empat) variabel belum berjalan	Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu lokus penelitian yang berbeda

No	Judul Penelitian	Peneliti dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan atau Perbedaan
				efektif.	
7.	Kolaborasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Ditinjau Dari Model Tata Kelola Kolaboratif	Melvina O Damanik, Amy Yayuk Sri Rahayu Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA	Tujuan penelitian menggambarkan kondisi kolaborasi menggunakan model Tata Kelola Kolaboratif Chris Ansell dan Allison Gash	Tata kelola kolaboratif sudah mulai tergambar dalam kolaborasi Satuan Tugas Pencegahan Karhutla Provinsi Riau, namun diperlukan beberapa pemenuhan di beberapa variabel kolaborasi.	Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu lokus penelitian yang berbeda
8.	<i>Burning through Boundaries: Collaborative Governance and Wildland Fire Planning in</i>	<i>A Dissertation Submitted To The Faculty Of The Graduate School Of The</i>		Proses dan hasil perencanaan kebakaran lahan liar adalah tergantung pada desain mandat kebijakan	Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu teori yang digunakan berbeda dan lokusnya

No	Judul Penelitian	Peneliti dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan atau Perbedaan
	<i>the United States and New South Wales, Australia</i>	<i>University of Minnesota By Rachel Fassbinder Brummel</i>		untuk kolaborasi, serta perencanaan konteks.	juga berbeda
9.	<i>Controlling Forest Encroachment in Lore Lindu National Park with a Collaborative Governance Approach</i>	Abunawas Tjaija <i>International Journal of Sustainable Development and Planning</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tata kelola kolaboratif dalam pengendalian deforestasi hutan di Taman Nasional Lore Lindu.	Tata kelola kolaboratif yang terjadi dalam rangka pengendalian perambahan hutan di Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah belum maksimal. Namun, para pemangku kepentingan telah menyelesaikan kegiatan kolaboratif bersama.	Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu lokus penelitian yang berbeda
10.	<i>Forests, Governance, and</i>	Arun Agrawal <i>International</i>		Tinjauan ini menunjukkan bahwa karya	Perbedaan penelitian terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan atau Perbedaan
	<i>Sustainability: Common Property Theory and its Contributions</i>	<i>Journal of the Commons</i>		ilmiah tentang hutan milik bersama telah sangat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor kelembagaan yang membantu mengarah pada tata kelola sumber daya yang berkelanjutan.	dan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu tidak fokus pada collaborative governance dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan
11.	<i>Collaborative Governance Pentahelix</i> dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)	Agus Muklis, Moh. Taufik Hidayat, Hery Nariyah <i>International Journal of Demos</i>	Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis <i>collaborative governance pentahelix</i> pada proses Analisis	Hal ini terlihat dari beberapa indikator <i>collaborative governance</i> menurut Anshell and Gash yang belum tercapai yaitu Kondisi awal dan Proses	Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan konsep <i>pentahelix</i> sedangkan

No	Judul Penelitian	Peneliti dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan atau Perbedaan
	di Kabupaten Cirebon		Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) di Kabupaten Cirebon.	kolaborasi sehingga menjadi faktor penghambat. Sedangkan indikator lainnya yaitu Desain kelembagaan dan Kepemimpinan fasilitatif sudah optimal dan menjadi faktor pendukung <i>collaborative governance pentahelix</i> .	penelitian ini membahas proses dari <i>collaborative governance</i>
12.	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengelolaan Sampah	Niluh Eka Puri Setiawandari, Arimurti Kriswibowo Jurnal Kebijakan Publik	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kerjasama antara pemerintah,	Berdasarkan temuan penelitian, proses kerjasama di TPST Sampah Tanggung Jawabku di Kabupaten Lamongan	Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai

No	Judul Penelitian	Peneliti dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan atau Perbedaan
			masyarakat, dan swasta yang terjadi di TPST Sampah Tanggung Jawabku.	berjalan dengan baik meskipun masih terdapat hambatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola kolaboratif telah berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari aspek kolaborasi Ansell and Gash.	pengelolaan sampah sedangkan penelitian ini membahas pengendalian kebakaran hutan
13.	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten	Idris, Dian Herdiana, Iqbal Miftakhul Mujtahid Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis <i>collaborative governance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat sudah	Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai pengelolaan

No	Judul Penelitian	Peneliti dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan atau Perbedaan
	Natuna		dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah Di Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna	berjalan cukup baik Selain itu, faktor-faktor yang menghambat proses kolaboratif masih terjadi pada indikator financial yaitu masih terbatasnya pengalokasian anggaran untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat.	sampah sedangkan penelitian ini membahas pengendalian kebakaran hutan
14.	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Penanggulangan Banjir di Kota Medan	Nahot Tua Parlindungan Sihalohe Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan	Tujuan penelitian ini ialah menganalisis collaborative governance yang	Penelitian ini mengungkapkan bahwa aspek-aspek penanganan banjir di Medan perlu ditindaklanjuti dengan	Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas

No	Judul Penelitian	Peneliti dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan atau Perbedaan
		Humaniora	dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan dalam menangani banjir	memprioritaskan aspek governance dan distributive accountability, kemudian diikuti dengan aspek lain, yang secara berturut-turut.	mengenai penanganan banjir sedangkan penelitian ini membahas pengendalian kebakaran hutan
15.	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Oleh Aktivitas Industri Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak di Kota Pekanbaru	Tito Handoko, Syofian, M.Y. Tiyas Tinov Jurnal Administrative Reform	Tujuan Penelitian ini untuk melihat komitmen pemerintah dalam mengawasi kegiatan industri yang berdampak pada pencemaran lingkungan di sepanjang	Hal tersebut disebabkan sistem kelembagaan program belum mampu mengelola interaksi sosial antara berbagai pihak yang terlibat. Akibatnya mulai dari perencanaan sampai dengan pengelolaan program belum	Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai Pencemaran Lingkungan Pada Daerah Aliran Sungai sedangkan

No	Judul Penelitian	Peneliti dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan atau Perbedaan
			daerah aliran sungai (DAS) Siak.	dilakukan berdasarkan kebutuhan tata kelola lingkungan.	penelitian ini membahas pengendalian kebakaran hutan.

Sumber : diolah peneliti

Perbedaan penelitian “*Collaborative Governance* dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten” terhadap penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan untuk memberikan penjelasan bahwa penelitian ini tidak memplagiasi penelitian sebelumnya. Berikut adalah perbedaan penelitian terdahulu berupa beberapa poin penting yang termuat dalam jurnal-jurnal.

Penelitian pertama dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Bela Safira dan Alfi Rahman, Wais Alqarni dengan judul penelitian *Collaborative Governance* Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh yang dilihat melalui pendekatan *collaborative governance* serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kolaborasi yang dilakukan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh pada indikator initial condition sudah terlihat. Pada indikator *contingencies and constraints, outcomes and accountabilities, structure and governance, process*

components masih mengalami kendala di beberapa elemen pendukung pada indikator tersebut. Terdapat beberapa kendala dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh mulai dari kurangnya anggaran serta penegakan hukum belum masif dilakukan terhadap pelaku pembakaran. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu teori yang digunakan dan lokus yang berbeda.

Penelitian kedua dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Hashfi Rafdi, Sadu Wasistiono dan Meltarini dengan judul penelitian *Collaborative Governance* Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses tatakelola kolaboratif yang terjadi dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut serta menganalisis strategi berfikir menggunakan konsep pengukuran strategi baru yaitu analisis SWAR sekaligus mengujinya pada studi empirik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses kolaborasi sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dilihat dari keterlibatan swasta dalam mengupayakan tindakan pencegahan dan kesadaran dari masyarakat cukup tinggi akan bahaya dan sanksi yang akan diterima bila terbukti melakukan tindakan kriminal terhadap hutan dan lahan, Selain itu faktor cuaca sangat mempengaruhi terjadinya bencana karhutla, hal ini ditunjukkan melalui pendekatan teori *Collaborative Governance* Ansell and Gash (2007) dimana penanggulangan karhutla dapat dilihat dari kondisi awal, Desain Kelembagaan dan kepemimpinan fasilitatif yang mempengaruhi proses kolaborasi. Dari hasil analisis SWAR ditemukan beberapa kelemahan, kekuatan serta kewenangan yang menjadi pemerintah daerah terhadap penanggulangan bencana karhutla dengan hasil yang masih perlu banyak di evaluasi dari

pemerintah itu sendiri sebelum melakukan kolaborasi. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu menganalisis strategi berfikir menggunakan konsep pengukuran strategi baru yaitu analisis SWAR sedangkan penelitian ini tidak, kemudian lokusnya juga berbeda.

Penelitian ketiga dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Marta Delima Lumbanbatu, Fitri Kurnianingsih Dan Okparizan dengan judul penelitian *Collaborative governance* penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di kecamatan toapaya kabupaten bintang tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses tata kelola kolaboratif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Toapaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi *collaborative governance* dalam penanggulangan kebakaran hutan di kecamatan toapaya belum berjalan optimal dilihat dari indikatornya. (1) tahap inisiasi belum terpenuhi baik sumber daya manusia yang memadai, sarana prasarana dan anggaran yang memadai. (2) tahap pertimbangan belum berjalan optimal karena tidak adanya aturan dasar, musyawarah dan dialog belum berjalan efektif. (3) tahap implementasi belum berjalan dengan baik, terlihat dari proses penanggulangan masih dalam proses pemadaman sedangkan pencegahan dan perbaikan belum dilakukan secara maksimal. Kerjasama yang dilakukan dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan belum berjalan maksimal masih pada tahap koordinasi. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu teori yang digunakan berbeda dan lokusnya juga berbeda.

Penelitian keempat dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Tri Maylani dan Dadang Manshur dengan judul penelitian *Collaborative Governance* Dalam

Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui collaborative governance dalam pencegahan kebakaran hutan dan gambut di Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Collaborative governance* dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis belum maksimal. Ada beberapa indikator yang belum maksimal, yaitu : tujuan, kompromi dan komunikasi, sementara demokrasi dan kesehatan; kekuatan dan kepercayaan; dan tekad, komitmen dan stamina telah berjalan dengan baik. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu lokus penelitian yang berbeda.

Penelitian kelima dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Muhammad Faudy Pratama dengan judul penelitian Kolaborasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Kolaborasi BPBD, Hambatan Dan Upaya Dalam Mencegah Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Barito Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pelaksanaan kolaborasi terdapat banyak kendala mulai dari sarana prasarana yang dimiliki oleh badan penanggulangan bencana daerah dan jumlah personil lapangan yang sangat sedikit sehingga membuat kolaborasi dengan instansi lain sangat dibutuhkan. Kolaborasi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini melibatkan Polres Barito Timur dari pihak kepolisian yang dimana sering dilakukannya kegiatan-kegiatan bersama yang di dalamnya. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu teori yang digunakan berbeda dan lokusnya juga berbeda.

Penelitian keenam dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Dody Ruswandi dengan judul *Collaborative Governance On Natural Disaster Management : A Study On Forest And Land Fires In Central Kalimantan*. Penelitian Ini bertujuan Untuk mengkaji proses kolaborasi kolaboratif antar pemangku kepentingan yang belum berjalan optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tata kelola kolaboratif untuk pengelolaan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dengan pendekatan teori *Collaborative Governance* Ansell & Gash melalui 4 (empat) variabel belum berjalan efektif. Peran dan fungsi pemangku kepentingan belum dimasukkan ke dalam prinsip-prinsip model kolaboratif. Penelitian pada empat (empat) variabel kolaboratif menunjukkan bahwa kondisi daripada penelitian tidak menunjukkan bahwa proses kolaboratif berjalan dengan baik. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu lokus penelitian yang berbeda.

Penelitian ketujuh dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Melvina O Damanik dan Amy Yayuk Sri Rahayu dengan judul *Kolaborasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Ditinjau Dari Model Tata Kelola Kolaboratif*. Tujuan penelitian ingin menggambarkan kondisi kolaborasi multi sektor pencegahan karhutla di Provinsi Riau serta faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi tersebut menggunakan model Tata Kelola Kolaboratif Chris Ansell dan Allison Gash. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tata kelola kolaboratif sudah mulai tergambar dalam kolaborasi Satuan Tugas Pencegahan Karhutla Provinsi Riau, namun diperlukan beberapa pemenuhan di beberapa variabel kolaborasi. Rekomendasi penelitian bagi satgas adalah masih diperlukan

peningkatan dialog tatap muka untuk mengelaborasi aktivitas pencegahan yang sudah ada, pengembangan pemahaman bersama dalam menetapkan ukuran keberhasilan aktivitas pencegahan, dan mempertahankan komitmen serta rasa saling percaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi diantaranya adanya ketidakseimbangan sumber daya, kewenangan, serta pengetahuan, adanya desain kelembagaan yang formal, dan adanya kepemimpinan yang fasilitatif.

Penelitian ke depan dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Rachel Fassbinder Brummel dengan judul *Burning through Boundaries: Collaborative Governance and Wildland Fire Planning in the United States and New South Wales, Australia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses dan hasil perencanaan kebakaran lahan liar adalah tergantung pada desain mandat kebijakan untuk kolaborasi, serta perencanaan konteks. Misalnya, kelompok perencanaan kebakaran hutan AS harus berkomitmen untuk berpusat pada pembelajaran proses di tingkat lokal, tetapi desain mandat kebijakan untuk kolaborasi mempengaruhi jenis pembelajaran yang paling mungkin terjadi. Selain itu, legislatif mandat untuk kolaborasi di NSW memupuk penciptaan antar lebih aktif jaringan komunikasi organisasi selama perencanaan daripada sebelumnya, dengan faktor mediasi penting seperti ukuran kelompok dan sejarah antar organisasi konflik. Penerapan template perencanaan standar menimbulkan risiko menjadi fitur pengorganisasian utama perencanaan di NSW, mempromosikan konstruksi bersama lingkungan kebakaran yang dapat diatur yang belum tentu setuju untuk mencapai yang lebih luas, tujuan ekologi tingkat lanskap. Meskipun kebijakan NSW dan AS dibuat dengan tujuan yang sama, masing-masing memanfaatkan

mode tata kelola yang berbeda untuk struktur kolaborasi. Kebijakan birokratis NSW memfokuskan perencanaan ke arah strategis hasil, sementara kebijakan AS berbasis jaringan memfasilitasi hasil relasional yang positif. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu teori yang digunakan berbeda dan lokusnya juga berbeda.

Penelitian kesembilan dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Abunawas Tjaija dengan judul *Controlling Forest Encroachment in Lore Lindu National Park with a Collaborative Governance Approach*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tata kelola kolaboratif dalam pengendalian deforestasi hutan di Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) yang terletak di Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tata kelola kolaboratif yang terjadi dalam rangka pengendalian perambahan hutan di taman nasional lore lindu Sulawesi Tengah belum maksimal. Namun, para pemangku kepentingan telah menyelesaikan kegiatan kolaboratif bersama. Selain itu, mereka telah menjalankan peran dan kegiatan program masing-masing dalam rangka mensukseskan program peningkatan infrastruktur LLNP. Tata kelola kolaboratif yang terjadi sudah formal mengingat adanya kesepakatan tertulis. Namun dalam praktiknya, pemangku kepentingan lokal masih berpartisipasi dalam penambangan liar yang bekerja sama dengan pemangku kepentingan pendatang. Kerjasama pemerintah dalam pengendalian perambahan hutan di Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah masih belum maksimal. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu lokus penelitian yang berbeda.

Penelitian kesepuluh dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Arun Agrawal dengan judul *Forests, Governance, and Sustainability: Common Property Theory and its Contributions*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karya ilmiah tentang hutan milik bersama telah sangat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor kelembagaan yang membantu mengarah pada tata kelola sumber daya yang berkelanjutan. Namun, sejauh mana ia telah berhasil menemukan visibilitas dalam kaitannya dengan kekhawatiran global tentang deforestasi dan hubungan antara hutan dan mata pencaharian masih menjadi pertanyaan terbuka (namun lihat Nepstad et al. 2006). Misalnya, dalam Penilaian Sumber Daya Hutan Global terbaru (FAO 2005), ada sedikit diskusi tentang penelitian tentang milik bersama, atau tentang pentingnya lembaga dan hak milik dalam menentukan hasil yang terkait dengan hutan. Meskipun ada proporsi yang signifikan dari hutan yang diatur berdasarkan pengaturan komunal atau berbasis komunitas, penilaian tersebut gagal untuk memasukkan referensi tunggal dari bidang milik bersama. Demikian pula, ada sedikit penyebutan karya sarjana umum di salah satu publikasi terkini yang paling banyak dibaca tentang kemiskinan dan pembangunan (Sachs 2005). Terlepas dari pengetahuan umum tentang sejauh mana rumah tangga miskin bergantung pada milik bersama, terutama hutan milik bersama untuk aspek penting mata pencaharian mereka, mereka yang berfokus terutama pada kemiskinan tetap tidak memperhatikan kontribusi para sarjana milik bersama. Kesenjangan seperti itu – antara fokus penelitian yang sampai saat ini memandu para ilmuwan milik bersama berbasis hutan dan pertanyaan mendesak yang terkait dengan hutan serta nasib dan kehidupan mereka – sebagian merupakan hasil

dari konsentrasi keilmuan bersama yang terus-menerus dan hampir terpusat pada lembaga dan hak milik. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu lokus penelitian yang berbeda, kemudian penelitian terdahulu tidak fokus pada *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Penelitian kesebelas dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Agus Muklis, Moh. Taufik Hidayat, dan Hery Nariyah dengan judul *Collaborative Governance Pentahelix* dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) di Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *collaborative governance pentahelix* pada proses amdal ini belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa indikator *collaborative governance* menurut Anshell and Gash yang belum tercapai yaitu Kondisi awal dan Proses kolaborasi sehingga menjadi faktor penghambat. Sedangkan indikator lainnya yaitu Desain kelembagaan dan Kepemimpinan fasilitatif sudah optimal dan menjadi faktor pendukung *collaborative governance pentahelix* ini.

Penelitian keduabelas dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Niluh Eka Puri Setiawandari dan Arimurti Kriswibowo dengan judul *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah. Berdasarkan temuan penelitian, proses kerjasama di TPST Sampah Tanggung Jawabku di Kabupaten Lamongan berjalan dengan baik meskipun masih terdapat hambatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola kolaboratif telah berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari aspek kolaborasi Ansell and Gash. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu lokus penelitian yang berbeda, kemudian penelitian terdahulu membahas

mengenai pengelolaan sampah sedangkan penelitian ini membahas pengendalian kebakaran hutan.

Penelitian ketigabelas dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Idris, Dian Herdiana, dan Iqbal Miftakhul Mujtahid dengan judul *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat sudah berjalan cukup baik yang ditilik dari *Starting Condition, Collaborative Process, Facilitative Leadership dan Institutional design*. Selain itu, faktor-faktor yang menghambat proses kolaboratif masih terjadi pada indikator financial yaitu masih terbatasnya pengalokasian anggaran untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu lokus penelitian yang berbeda, kemudian penelitian terdahulu membahas mengenai pengelolaan sampah sedangkan penelitian ini membahas pengendalian kebakaran hutan. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu lokus penelitian yang berbeda, kemudian penelitian terdahulu membahas mengenai pengelolaan sampah sedangkan penelitian ini membahas pengendalian kebakaran hutan.

Penelitian keempatbelas dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Nahot Tua Parlindungan Sihalohe dengan judul *Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir di Kota Medan*. Penelitian ini mengungkapkan bahwa aspek-aspek penanganan banjir di Medan perlu ditindaklanjuti dengan memprioritaskan aspek governance dan distributive accountability, kemudian diikuti dengan aspek-aspek lain, yang secara berturut-turut meliputi: *access to*

authority, information sharing, networked structure, dan leadership. Ketika mengambil kebijakan kerja sama pada fase antisipasi, sebaiknya *collaborative governance* lebih ditekankan pada aktor akademisi dan pengembang software, karena hasilnya sangat berguna pada fase mitigasi dan resiliensi. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu lokus penelitian yang berbeda, kemudian penelitian terdahulu membahas mengenai penanggulangan banjir sedangkan penelitian ini membahas pengendalian kebakaran hutan

Penelitian kelimabelas dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Tito Handoko, Syofian, dan M.Y. Tiyas Tinov dengan judul *Collaborative Governance* Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Oleh Aktivitas Industri Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak di Kota Pekanbaru. Sistem kelembagaan program belum mampu mengelola interaksi sosial diantara berbagai pihak yang terlibat. Akibatnya mulai dari perencanaan sampai dengan pengelolaan program belum dilakukan berdasarkan kebutuhan tata kelola lingkungan. Oleh sebab itu dibutuhkan sistem kelembagaan yang mampu mengelola interaksi sosial diantara berbagai pihak dalam meminimalisasi pencemaran lingkungan oleh aktivitas industri di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Siak. Berdasarkan kondisi tersebut, tulisan ini menghasilkan model bagi penguatan kelembagaan melalui pendekatan *collaborative governance* dalam meminimalisasi pencemaran lingkungan pada daerah aliran sungai (DAS) Siak. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu lokus penelitian yang berbeda, kemudian penelitian terdahulu membahas mengenai Pencemaran Lingkungan Oleh Aktivitas Industri

Pada Daerah Aliran Sungai sedangkan penelitian ini membahas pengendalian kebakaran hutan.

1.5.2 Kajian Teori

1.5.2.1 Administrasi Publik

Menurut Paul C.Bartholomew (dalam Wirman Syafri, 2012:23-24) menyatakan Administrasi Publik menurut pengertian ilmu politik mempunyai dua arti. Dala arti luas, administrasi publik berarti pekerjaan-pekerjaan yang terliput di dalam (yang dilakukan dalam rangka) penanganan yang aktual terhadap masalah-masalah pemerintahan, dalam arti sempit, administrasi publik berarti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh cabang administrasi saja, yakni kegiatan kepala eksekutif (kepala negara) dan para pejabat pembantuannya yang disebut administrator. Sedangkan Administrasi Publik adalah proses penyelenggaraan kehendak publik (*public wiil*) sebagaimana yang dinyatakan di dalam hukum, dengan kata lain pengkoordinasian usaha bersama untuk mengimplementasikan kebijakan umum. Lebih tegas dapat dikemukakan bahwa administrasi berkenaan dengan cara unit perumus kebijakan dari keseluruhan pemerintahan-pemilih, legislatif atau eksekutif.

Menurut Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2010;8) mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha

melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Orientasi administrasi publik menurut Thoha (dalam Pasolong, 2007:53), sekarang ini diarahkan kepada kepentingan dan kekuasaan kepada rakyat alasan seperti itu teori administrasi publik lebih menekankan pada program aksi yang berorientasi pada kepentingan publik, sehingga eksistensi administrasi publik tidak hanya sekedar lukisan saja melainkan adanya manfaat bagi kepentingan publik.

Dengan demikian bahwa Administrasi Publik dan juga yang lebih dikenal dengan sebuah administrasi negara yaitu merupakan sekumpulan orang yang saling bekerjasama didalam suatu organisasi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan organisasi secara efektif dan efisien, dan juga administrasi negara bergerak dalam organisasi pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan sebuah pelayanan yang baik bagi seluruh masyarakat melalui kinerja pegawai yang kompeten dalam bekerja sehingga akhirnya dapat menciptakan suatu kepuasan terhadap pemberian pelayanan.

1.5.2.2 Manajemen Publik

Menurut Overman dalam Keban (2004:85) mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah "*scientific manajemen*", meskipun sangat dipengaruhi oleh "*scientific manajemen*". Manajemen publik bukanlah "*policy analysis*", bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi politik kebijakan di pihak lain. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan

antara fungsi manajemen seperti planning, organizing dan controlling satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain.

Manajemen publik adalah cabang atau satu aspek dari bidang studi yang lebih luas yakni ilmu administrasi publik. Sebagai bagian dari Administrasi Publik, Manajemen Publik adalah ilmu atau seni yang berintikan *methodology* terapan untuk merancang program-program administrasi publik, restrukturisasi organisasi, kebijakan dan perencanaan manajerial, alokasi sumberdaya, system penganggaran (*budgeting systems*), pengelolaan *financial*, manajemen SDM, masalah audit serta evaluasi program. Secara lebih spesifik, sering pula dikatakan bahwa manajemen publik memandang administrasi publik sebagai profesi sedangkan administrasi publik memandang manajer publik sebagai praktisi.

Manajemen publik memiliki fokus internal untuk membuat agar mesin pemerintahan dan organisasi non profit dapat bekerja dengan baik, meskipun demikian ia tidak bisa terlepas dari interaksi dan pengaruh lingkungan dimana organisasi publik iu berada.

Manajemen publik mencakup subjek yang sangat kompleks. Fokus studinya tidak sesederhana bagaimana seseorang manajer mengelola organisasi publik atau bagaimana orang-orang di-manage dalam organisasi publik. Aktivitas manajemen publik akan selalu bersentuhan dengan masalah kebijakan publik, politik dan berbagai kepentingan publik. Jadi, sebagai sebuah bidang studi, manajemen publik merupakan *interdisciplinary study* tentang aspek-aspek umum organisasi yang memiliki orientasi rasional-instrumental pada satu sisi dan disisi lainnya *political policy orientations*.

1.5.2.3 Governance

Konsep *governance* berangkat dari istilah *government*. *Government* atau pemerintah merupakan istilah yang digunakan pada organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah pada suatu negara. Konsep *government* ini dapat dikatakan sebagai konsep lama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena hanya menekankan pada pemerintah (lembaga/institusi pemerintah) sebagai pengatur dan pelaksana tunggal penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu muncullah konsep *governance* yang menggantikan konsep *government* dalam aspek maupun kajian pemerintahan. Selanjutnya *governance* berasal dari kata “*govern*” dengan definisi yakni mengambil peran yang lebih besar, yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat. Dengan demikian secara luas, *governance* termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun nonpemerintah.

Governance merupakan model pemerintahan yang sangat dinamis. Dengan kata lain, *governance* membuka ruang untuk keterlibatan atau partisipasi sektor lain dalam pemerintahan. Pemerintah bukanlah aktor yang tunggal atau dominan dalam pemerintahan. Selain itu, pendapat tersebut menjelaskan bahwa terjadi pengurangan terhadap otoritas pemerintah terkait dengan urusan publik. Pemaknaan tersebut dapat ditinjau dari suatu kondisi yang terjadi ketika pemerintah dalam penyelenggaraan urusan-urusan publik mengalami permasalahan di luar kemampuannya, sehingga dalam penanganan permasalahan tersebut perlu melibatkan pihak lain yang memiliki kapasitas atau kemampuan

lebih dan tentunya dapat membantu pemerintah. kondisi tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh keterbatasan kapabilitas pemerintah dalam hal sumberdaya dan finansial.

Rosidi dan Fajriani memetakan bahwa terdapat 3 aktor yang berpengaruh dalam proses *governance*. Tiga aktor tersebut yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. ketiga aktor tersebut saling berkolaborasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintah. melainkan memerlukan aktor lain karena keterbatasan kemampuan pemerintah. Swasta dengan dukungan finansialnya harus mampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Swasta dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk mengurus kepentingannya sendiri yakni hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi.

1.5.2.4 Collaborative Governance

Salah satu tipe dari konsep penyelenggaraan pemerintahan atau *governance* yakni disebut konsep *collaborative governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif. Menurut pendapat Ansell dan Ghosh “*Collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actor work collectively in distinctive way, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods*”. *Collaborative Governance* dapat dikatakan sebagai salah satu dari tipe *governance*. Konsep ini menyatakan akan pentingnya suatu kondisi dimana aktor publik dan aktor privat (bisnis) bekerja sama dengan cara dan proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik

atau, masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktor publik yaitu pemerintah dan aktor privat yaitu organisasi bisnis atau perusahaan bukanlah suatu yang terpisah dan bekerja secara sendiri-sendiri melainkan bekerja bersama demi kepentingan masyarakat.

Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independent. Dalam bahasa Indonesia, istilah kerjasama dan kolaborasi masih digunakan secara bergantian dan belum ada upaya untuk menunjukkan perbedaan dan kedalaman makna dari istilah tersebut. Secara definisi, para ahli mendefinisikan *collaborative governance* dalam beberapa makna yang ide utamanya sama, yakni adanya kolaborasi antara sektor publik dan non publik atau privat dalam penyelenggaraan pemerintahan atau *governance*. Ansell dan Gash mendefinisikan *collaborative governance* sebagai berikut ini:

“A Governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public program or assets. (Collaborative governance adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung stakeholder non-state di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi consensus dan deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program atau aset.)”

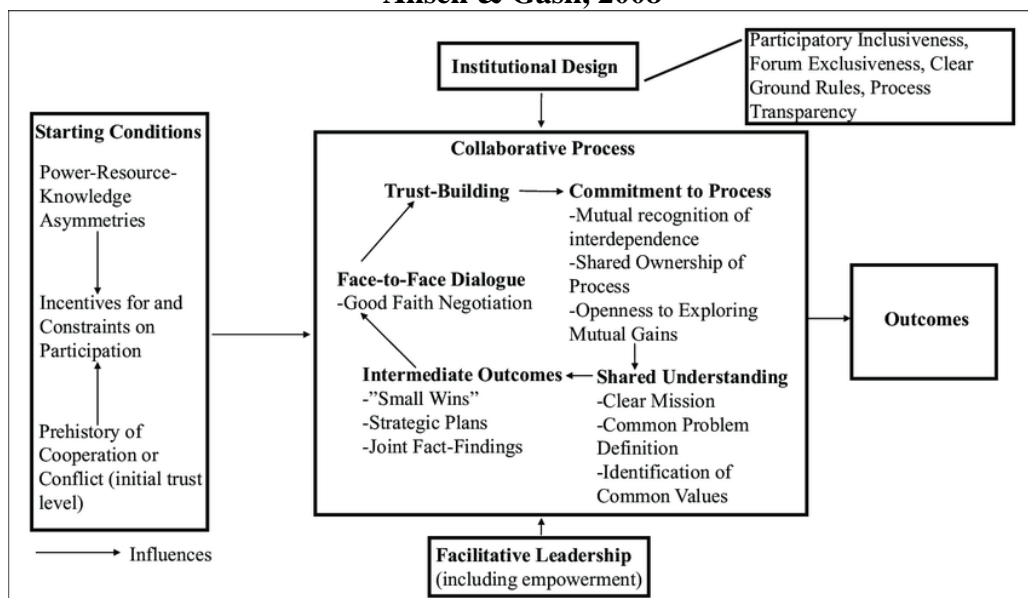
Menurut Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa *collaborative governance* sebagai sebuah strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus bersama. Ansell dan Gash menekankan ada 6 kriteria dalam proses *collaborative governance*. Pertama, forum tersebut diinisiasi oleh institusi publik; kedua, partisipan dalam forum tersebut harus mencakup aktor nonpemerintah; ketiga, partisipan harus terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan tidak sekedar “berkonsultasi” dengan pihak pemerintah; keempat, forum harus terorganisasi secara formal dan ada pertemuan secara rutin; kelima, kebijakan yang diambil harus berdasarkan *consensus*; dan keenam, kolaborasi berfokus pada kebijakan publik atau manajemen publik (Ansell and Gash, 2008).

Selanjutnya penjelasan Ansell & Gash dalam Sudarmo (2011) disampaikan dengan lebih spesifik bahwa dengan adanya beberapa alasan dan pentingnya sebuah konsep *collaborative governance* diambil kesimpulan bahwa *collaborative governance* ada karena kesengajaan dan diciptakan secara sadar karena alasan-alasan, yaitu: (a) Hubungan yang kompleks dan adanya saling tergantung pada organisasi; (b) Timbulnya konflik kepentingan antar kelompok yang sulit diselesaikan karena sudah mendarah daging; (c) Menggunakan solusi baru untuk kepentingan legitimasi politik; (d) Adanya kegagalan dalam implementasi program di lapangan; (e) Kurangnya kemampuan beberapa kelompok dikarenakan adanya pemisahan rezim-rezim kekuasaan pada organisasi lain untuk menunda pengambilan keputusan; (f) Peningkatan mobilisasi sebagai wujud

pengorganisasian kelompok; serta (g) Tingginya anggaran dan campur tangan politik pada kebijakan.

Ansell & Gash (2008) mengembangkan sebuah model *collaborative governance* dengan empat buah variabel utama, yaitu kondisi awal (*starting condition*), *institutional design*, kepemimpinan, dan proses kolaborasi. Keempat variabel tersebut kemudian terbagi menjadi beberapa sub-variabel yang digambarkan dalam gambar 4, sebagai berikut:

Gambar 1.7
Model Collaborative Governance Ansell & Gash Sumber:
Ansell & Gash, 2008



Sumber : Buku Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik

1.5.3 Proses kolaboratif

Awal dari proses kolaborasi sangat sulit ditentukan akan dimulai darimana. Dari kelima proses kolaboratif, dapat dimulai dari mana saja. Dari kelima proses kolaboratif (lihat gambar 4 proses kolaborasi), dapat dimulai dari mana saja.

a. Dialog tatap muka (*face to face dialogue*)

Semua *collaborative governance* dibangun berdasarkan adanya “dialog antara para pemangku kepentingan”. Dialog ini sebagai sebuah proses, yang berorientasi pada lahirnya konsensus/ kesepakatan. Dialog pemangku kepentingan ini biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dengan mengedepankan narasi bahwa akan adanya keadaan “saling menguntungkan” para pemangku kepentingan bila dapat berkolaborasi.

b. Membangun kepercayaan (*trust building*)

Membangun kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari proses dialog. Para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan diantara para pemangku kepentingan. Proses dalam membangun kepercayaan merupakan proses jangka panjang yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen yang tinggi.

c. Komitmen dalam proses kolaborasi (*commitment to process*)

Adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi diantara para pemangku kepentingan kemungkinan akan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Perlu ditekankan bahwa berkolaborasi bukanlah kesepakatan satu kali akan tetapi merupakan sebuah proses kegiatan kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

d. Pemahaman bersama (*Shared Understanding*)

Pada titik tertentu, para pemangku kepentingan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat dicapai. Pemahaman bersama ini dapat berupa adanya tujuan bersama yang jelas, definisi

masalah yang dihadapi bersama juga sudah jelas dan pemahaman bersama mengenai nilai yang akan di capai dalam berkolaborasi.

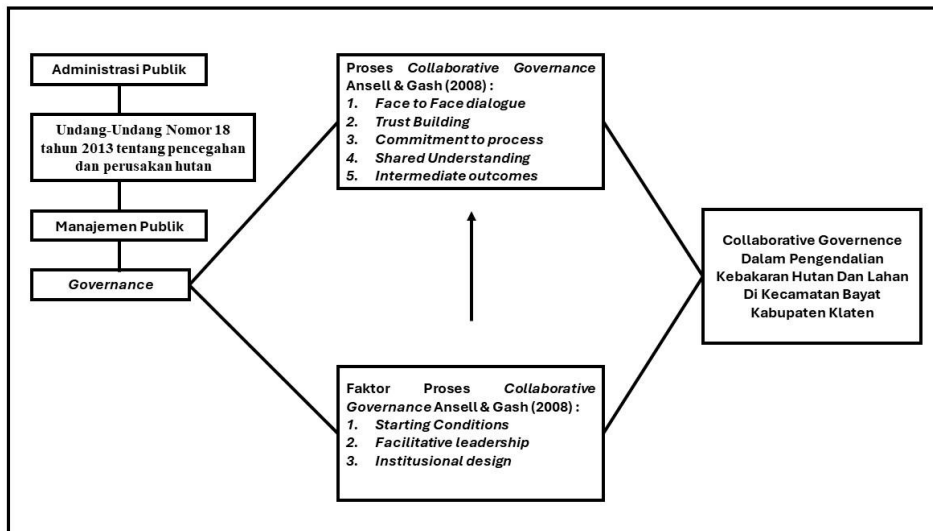
e. Hasil antara (pertengahan) (*intermediate outcomes*)

Kolaborasi lebih mungkin berlanjut ketika hasil dari tujuan dan keuntungan dari kolaborasi dapat dirasakan secara nyata walaupun masih kecil sebagai sebuah hasil antara (pertengahan) dari proses kolaborasi. Hasil kecil (*small win*) ini dapat menjadi pendorong dalam membangun kepercayaan dan komitmen bersama para pemangku kepentingan.

1.5.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian proses *collaborative governance* dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.8
Kerangka Berpikir



Sumber : diolah peneliti

1.6 Operasionalisasi Konsep

Collaborative Governance adalah suatu bentuk kerja sama diantara 3 pilar *good governance* dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Untuk mengetahui bagaimana kolaborasi yang diciptakan oleh pemerintah daerah dan faktor pendukung serta penghambat dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, maka peneliti menggunakan model *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash. Hal tersebut dikarenakan model *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash lebih tepat untuk menjawab permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, dimana dimulai dari kondisi awal, bagaimana desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif hingga proses kolaboratif yang terstruktur akan memudahkan pemahaman peneliti.

1.6.1 Proses *Collaborative Governance*

Proses *Collaborative Governance* dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka untuk menanggulangi permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Proses kolaborasi yang dilakukan antar lembaga dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten diukur melalui fenomena yaitu sebagai berikut:

a. Dialog tatap muka (*face to face dialogue*)

Dialog tatap muka dilakukan untuk mengetahui proses kolaborasi yang terjadi dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan diperlukan adanya dialog antara pemangku kepentingan yang dinilai sebagai sebuah langkah awal serta proses yang berorientasi pada lahirnya kesepakatan bersama. Aspek yang diamati dalam tahap ini yaitu :

- 1) Bentuk negosiasi dalam mengidentifikasi hasil
- 2) Hambatan dalam melaksanakan collaborative governance.

b. Membangun kepercayaan (*trust building*)

Membangun kepercayaan merupakan langkah lanjutan dari proses dialog dimana para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan diantara para pemangku kepentingan dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Proses kolaborasi berkaitan dengan upaya membangun kepercayaan antar stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan agar tidak mengalami egosentrisme selama melakukan proses kolaborasi. Aspek yang diamati dalam membangun kepercayaan selama proses kolaborasi dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan adalah :

- 1) Komunikasi dan keterbukaan informasi antar aktor kolaborasi
- 2) Pelaksanaan tupoksi masing-masing aktor kolaborasi

c. Komitmen dalam proses kolaborasi (*commitment to process*)

Komitmen untuk berkolaborasi dipicu oleh adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi diantara para pemangku kepentingan, dalam hal

ini kolaborasi yang berlangsung bukan hanya kesepakatan satu kali tetapi menjadi sebuah proses kegiatan kerjasama yang berkelanjutan dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Kepercayaan yang telah dibangun dalam proses kolaborasi akan menghasilkan sebuah komitmen bersama untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Aspek yang diamati oleh peneliti dalam Komitmen terhadap proses adalah :

- 1) Pengakuan saling ketergantungan antar aktor dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan
- 2) Upaya masing-masing aktor kolaborasi dalam membangun kepercayaan
- 3) Motivasi untuk aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan kolaborasi sebagai bentuk tanggung jawab

d. Pemahaman bersama (*Shared Understanding*)

Pemahaman bersama ini melalui perumusan masalah bersama sehingga muncullah adanya tujuan bersama yang jelas dalam hal ini penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, definisi masalah yang dihadapi bersama juga sudah jelas dan pemahaman bersama mengenai nilai yang akan dicapai dalam berkolaborasi. Para aktor yang terlibat kolaborasi dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka capai melalui kolaborasi. Aspek yang diamati dalam pemahaman bersama adalah :

- 1) Visi dan misi bersama dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan
- 2) Tujuan dan arah strategis dari program

- e. Hasil antara (pertengahan) (*intermediate outcomes*)

Hasil Sementara merupakan inti dari proses kolaborasi. Pada tahap ini akan membuktikan apakah berdasarkan hasil dari proses kolaborasi dan dampak yang diakibatkan mengindikasikan tujuan kolaborasi dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan tercapai atau tidak. Aspek yang diteliti adalah *small wins*. *Small wins* merupakan cita-cita jangka pendek yang ingin dicapai dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.

1.6.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Proses *Collaborative Governance*

Dalam menganalisa faktor pendukung dan penghambat dari proses *Collaborative Governance* dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, peneliti menggunakan tiga variabel *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash, yaitu sebagai berikut :

- a. Kondisi awal (*starting conditions*)

Untuk mengetahui kondisi awal dari *collaborative governance* dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten penulis akan mengamati bagaimana awal dimulainya kolaborasi antara pemangku kepentingan melalui adanya perbedaan sumber daya dan wewenang antar pelaku kolaborasi dan sejarah kerjasama yang dilakukan.

- 1) Ketidakseimbangan sumberdaya instansi yang terlibat kolaborasi
- 2) Insentif untuk berpartisipasi dalam kolaborasi
- 3) Sejarah kerjasama kolaborasi

b. Desain Kelembagaan (*institutional design*)

Desain kelembagaan merupakan prosedur dasar dan aturan-aturan dasar yang digunakan dalam menjalankan proses *collaborative governance*, untuk mengetahui desain kelembagaan yang ada, penulis akan mengamati tentang aturan Dasar yang digunakan sebagai landasan hukum kolaborasi dan proses transparansi dalam kolaborasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.

c. Kepemimpinan

Kepemimpinan fasilitatif untuk menyatukan para stakeholders dan memberdayakan mereka agar saling terlibat dalam proses kolaboratif. Adapun kepemimpinan fasilitatif berkaitan dengan musyawarah, penetapan aturan-aturan dasar yang jelas, sehingga gejala yang diamati adalah:

- 1) *Leading Sector* kolaborasi
- 2) Kegiatan-kegiatan kolaborasi
- 3) Pengawasan kegiatan kolaborasi

1.7 Argumen Penelitian

Berdasarkan keadaan di lapangan, terjadinya kebakaran hutan dan lahan tidak dapat diprediksi. Maka dari itu *collaborative governance* menjadi hal utama dalam proses pengendalian pada saat sebelum kebakaran, saat kebakaran terjadi, dan sesudah kebakaran terjadi karena dengan adanya kontribusi dari para *stakeholders* dapat mengoptimalkan kerjasama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan sehingga lebih efektif dan efisien agar mencapai tujuan dengan cepat dan mudah, namun dalam kolaborasi untuk pengendalian kebakaran hutan

dan lahan di Kecamatan Bayat belum berjalan dengan optimal karena beberapa kendala dalam penemuan titik api dan kesadaran masyarakat.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan fenomena sosial dan mendeskripsikan fenomena sosial dengan membandingkan gejala yang ditemukan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada saat ini. Dalam prakteknya tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan klasifikasi data saja tetapi juga menganalisa dan menginterprestasikan makna data tersebut. Itulah alasan mengapa peneliti mengambil penelitian kualitatif.

Dengan demikian melalui penelitian kualitatif deskriptif ini peneliti hanya berusaha untuk menggambarkan permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan “Proses *Collaborative Governance* Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten”

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Kecamatan Bayat memiliki beberapa desa yang terdampak kebakaran hutan dan lahan yaitu Desa Gunung Gajah, Desa Krakitan, Desa Wiro, Desa Jotangan, dan Desa Kebon. Penelitian ini juga dilakukan di Cabang Dinas Kehutanan Jawa Tengah Wilayah X dan Perhutani KPH Surakarta.

Lokasi ini dipilih berdasarkan beberapa faktor antara lain sebagai berikut: pertama, karena hutan tersebut merupakan milik Perhutani KPH Surakarta dan sebagian lahan milik masyarakat desa hutan. Kedua, karena hutan di desa tersebut sering terjadi kebakaran.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek atau informan adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Subjek penelitian inilah yang nantinya dapat peneliti manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi di lokasi penelitian. Teknik pemilihan informan yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik purposive, artinya teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya. Teknik purposive ini digunakan karena sampel yang dipilih oleh peneliti dipilih secara khusus yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Pengambilan sampel tersebut bertujuan untuk memperoleh key informan yaitu dinas-dinas yang benar-benar mengetahui tentang program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih harus informan yang jujur dan dapat dipercaya serta yang benar-benar memahami dalam menangani kebaaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Maka yang menjadi informan diantaranya: Dalam penelitian ini, informan yang dipilih harus informan yang jujur dan dapat dipercaya serta yang benar-benar memahami dalam mengatasi :

- a. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah X

- b. Kabid P3H (Penyuluhan, Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan) Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah X
- c. Penyuluh Kehutanan Wilayah Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten
- d. Kepala Perhutani RPH (Resort Pengelolaan Hutan) Cawas
- e. Masyarakat Peduli Api (MPA) Bayat
- f. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kecamatan Bayat

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat deskriptif, yaitu data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1.8.5 Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif ini adalah:

A. Data Primer

Lofland (dalam Lexy J. Moleong, 2012:157) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Data primer yang diperoleh dan digunakan dapat berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan dengan informan, hasil observasi lapangan secara langsung dalam bentuk catatan tentang situasi kejadian dan data-data mengenai informasi.

B. Data Sekunder

Sugiyono (2016: 225) mengatakan bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya

melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, laporan-laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan. Sehingga sumber data sekunder dalam penelitian adalah hasil dari observasi dan studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi. Jenis pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Jenis pengumpulan data ini diharapkan agar saling melengkapi sehingga informasi yang diperlukan sesuai dengan penelitian.

- a) Observasi (pengamatan langsung), yaitu pengumpulan data yang didapatkan dengan cara pengamatan langsung ditempat dan pencatatan terhadap masalah yang berkaitan Proses *Collaborative Governance* Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.
- b) Wawancara, wawancara dilakukan dengan informan. Peneliti akan menggunakan teknik wawancara berstruktur yaitu pertanyaan telah dirumuskan sebelum berhadapan dengan informasi, agar bahan pengolahan data dapat lebih mudah. Selain ini peneliti juga akan menggunakan metode wawancara tak berstruktur berguna untuk memahami karakter asli sebuah komunitas sosial karena jabatan akan lebih terbuka.

- c) Dokumen, dokumen adalah data-data yang dapat diperoleh dari instansi, dalam hal ini dokumen berisi tentang segala urusan instansi dalam pelaksanaan tugas. Dokumen ini berupa peninggalan tertulis, arsip-arsip, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Teknis analisis data dilakukan setelah semua data primer dan sekunder terkumpul, yang kemudian diolah kembali oleh penulis. Analisis berarti mengolah data, mengorganisasir data, memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama. Dengan kata lain data mengenai proses *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten yang sudah dikumpulkan secara keseluruhan ditarik kesimpulannya secara general. Data tersebut menjawab semua rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal dan juga merupakan temuan baru yang sebelumnya belum diketahui.

- a) *Data reduction* (Reduksi Data) yaitu memilih dan memfokuskan yang penting dan merangkum data yang pokok. Di dalam reduksi data, laporan-laporan lapangan dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok difokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema atau polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan baku mentah disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari data yang diperoleh bila diperlukan reduksi data dapat pula membantu dalam

memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Pada fase ini, peneliti menyeleksi informasi yang diterimanya dari lapangan. Tergantung pada fokus penelitian, bahan dipilih dari bahan primer dan data sekunder.

- b) Data *display* (Penyajian Data) menurut Miles dan Huberman dalam buku Saldana menyatakan bahwa yang sering digunakan dalam menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Agar peneliti tidak tenggelam oleh kumpulan data oleh karena itu agar dapat melihat gambar keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian ini, harus diusahakan membuat alat ukur yaitu pedoman wawancara dan pedoman observasi.
- c) Klasifikasi data (Penarikan Kesimpulan dan Klarifikasi) sejak awalnya peneliti berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkannya. Untuk itu peneliti mencari tema, pola hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya. Jadi data yang diperoleh dari pihak sejak awal mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula masih sangat kabur, diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan yaitu akan lebih tetap lengkap jadi kesimpulan senantiasa harus diverifikasikan selama penelitian berlangsung hingga akhir tercapai kesimpulan terakhir.

1.8.8 Kualitas Data (*goodness criteria*) dan Keabsahan data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320).

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007:270).

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

Triangulasi sumber, berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton dalam Moloeng (2007:330). Hal tersebut dapat dicapai dengan langkah :

- a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil Wawancara
- b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
- c) Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
- d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang
- e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

Triangulasi metode, menurut Patton dalam Moloeng (2007:331), terdapat dua strategi yaitu :

- a) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data
- b) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama

Triangulasi penyidik, yaitu dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kekeliruan dalam pengumpulan data (Moloeng, 2007:331)

Triangulasi teori, menurut Lincoln dan Guba dalam Moloeng (2007:331), berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.

Penelitian ini menggunakan pemeriksaan keabsahan data dengan triangulasi sumber, dimana dalam penelitian peneliti tidak hanya mencari sumber informasi dengan melakukan wawancara terhadap satu informan saja melainkan melakukan wawancara dengan beberapa informan yang berbeda, kemudian dipastikan kebenarannya dengan melakukan analisis data hasil wawancara dengan kondisi di lapangan melalui observasi dan dokumentasi yang berkaitan.